

EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Oleh :

Herry Yulistiyono, MSi

Abstrak

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Secara garis besar penelitian ini meliputi tiga kegiatan, yaitu: (1) Identifikasi kondisi kelembagaan lokal koperasi nelayan; (2) Analisis kondisi eksisting yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan; dan (3) Menyusun pola/bentuk penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana survey melalui observasi, wawancara terhadap instansi terkait dan deep interview terhadap 120 responden masyarakat nelayan atas kepeduliannya terhadap kegiatan kelembagaan "koperasi nelayan".

Hasil yang diperoleh aus identifikasi permasalahan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangkalan, antara lain: (a). Keterbatasan pemanfaatan sumberdaya laut, (b). Sumber daya manusia (nelayan) masih rendah, (c). Teknologi penangkapan yang masih sederhana, (d). Teknologi pengolahan ikan (pasca panen) yang tradisional, (e). Kelembagaan ekonomi nelayan dan permodalan yang lemah. Kondisi terkini mengenai kelembagaan koperasi nelayan pada obyek penelitian adalah rendahnya kesadaran nelayan/responden terhadap pentingnya pendidikan sehingga berdampak pada pola pikir dan kebiasaan nelayan dalam menjalankan model usahanya, sebagai besar nelayan/responden tidak mempunyai alternatif pekerjaan selain menjadi nelayan dan pengetahuan responden tentang koperasi masih rendah, masih diperlukan perlakuan pemberdayaan yang terus menerus dan berkelanjutan. Alternatif usulan atas hasil penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu nelayan sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki. Namun bila dilakukan secara kolektif melalui manajemen koperasi yang profesional, kekuatan pasar nelayan di pasar input dan output akan meningkat. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis untuk penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan pola kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya

Kata kunci: masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi, koperasi nelayan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah *stakeholder* dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan menciptakan konflik-konflik baru. Untuk memecahkan permasalahan konflik antar kepentingan dalam pembangunan kawasan pesisir dan laut, *The World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien serta layak), sosial (berkeadilan) dan ekologis (ramah lingkungan).

Berbagai pendekatan kebijakan pemerintah yang bersifat makro maupun mikro yang bertujuan untuk menekan dan memperkecil resiko dan dampak krisis ekonomi telah banyak dilakukan. Proses pemulihan perekonomian masyarakat ini menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan dengan program pemberdayaan. Pola pendekatan yang ditempuh berbasiskan pada fungsi penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan masyarakat (SDM) serta memaksimalkan potensi lokal. Kawasan pembangunan pesisir dan laut, dikatakan berkelanjutan secara ekonomi (*an economically sustainable area*) jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa (*goods and service*) secara berkesinambungan (*on a continuing basis*) dan menghindari ketidakseimbangan ekstrim antar sektor (*extreme sectoral imbalances*) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor primer, sektor sekunder (*manufacturing*) atau sektor tersier.

Tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan nelayan dimanapun berada. Tingkat kehidupan mereka setaraf dengan petani kecil. Bahkan jika dibandingkan secara seksama dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang miskin. Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain, mengingat nelayan sangat terikat dengan pekerjaan menangkap ikan di laut sehingga nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya kemiskinan di kehidupan nelayan.

Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan

yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak modernisasi kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut lainnya. Proses demikian masih terus berlangsung dan dampak lebih lanjut yang dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan meningkatnya pengeluaran rumah tangganya.

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Untuk itu perlu selalu dilakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup minimum sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan ini dapat mendorong masyarakat pesisir untuk berkembang dengan mandiri. Di dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat perlu diusahakan program peningkatan produktivitas masyarakat sehingga dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja atau usaha baru. Selain itu yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam rangka pengembangan sumberdaya masyarakat pesisir perlu adanya keterpaduan dan koordinasi antar para pelaksana pembangunan terutama pada masyarakat pesisir sendiri. Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pesisir dapat dispesifikasi sebagai masalah di bidang pengetahuan dan ketrampilan, permodalan, penguasaan teknologi dan manajemen serta peranan lembaga. Strategi yang dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat pesisir adalah membantu masyarakat pesisir agar dapat membangun dan berkembang atas kemampuan sendiri dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam dan sumberdaya manusia. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu program utama Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara spesifik program ini bertujuan untuk :

1. Menumbuhkan kultur kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat pesisir
2. Memfasilitasi tumbuhnya Lembaga Ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir
3. Mengurangi beban masyarakat pesisir akibat pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kultur kewirausahaan masyarakat pesisir diupayakan melalui pembentukan kelompok masyarakat sebagai cikal bakal unit usaha ekonomi di desa. Melalui kelompok-kelompok ini diharapkan masyarakat pesisir belajar mengelola usaha bersama berdasar prinsip-prinsip manajemen modern tanpa meninggalkan tradisi. Dengan

demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan.

Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi kelembagaan lokal koperasi nelayan.
- 2) Menganalisis kondisi *existing* mengenai kelembagaan koperasi nelayan pada obyek penelitian.
- 3) Memberi masukan bentuk/pola penguatan kelembagaan koperasi nelayan.

Manfaat

1. Bagi peneliti kegiatan ini bermanfaat sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami fenomena kemiskinan masyarakat nelayan guna memperoleh solusi yang efektif dan efisien melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
2. Bagi nelayan kegiatan ini bermanfaat untuk memberi gambaran pola masyarakat nelayan dalam pemenuhan kegiatan ekonominya melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
3. Bagi Pemerintah kegiatan ini bermanfaat untuk mendukung program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sedang berlangsung dan sebagai salah satu alternatif solusi untuk mengatasi fenomena kemiskinan masyarakat nelayan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment*", yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Rokhmin Dahuri, 2001).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan sumberdaya lokal (*community-based resources management*), yang merupakan mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*)

dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan (*empowerment*) potensi ekonominya (DitjenNak, 2000h). Dalam kaitan ini, ciri-ciri pendekatan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat meliputi (Ndraha, T. 1982):

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus utama sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis.
4. Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri untuk mengelola sumberdaya setempat.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa keberadaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Gagalnya suatu tindakan akan menyebabkan stress yang berlanjut, yang berpengaruh pada kondisi individu maupun pada respon atau tanggapan individu terhadap lingkungan. Sebaliknya, apabila tindakan itu berhasil maka akan terjadi penyesuaian-penyediaan individu terhadap lingkungan. Keberhasilan dalam memilih tindakan ini merupakan suatu strategi adaptasi manusia yang pada gilirannya akan menjadi norma sosial (Moeljarto, 2004).

Kelembagaan

“Kelembagaan” merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan dan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam sosiologi. Istilah “kelembagaan” (*social institution*) selalu disilangkan dengan “organisasi” (*social organization*). Dalam bahasa keilmuan, seluruh apa yang dikenal dengan organisasi formal dan nonformal, lembaga formal dan nonformal, institusi, asosiasi, maupun kelembagaan; disebut dengan “kelembagaan”. Seluruhnya mengandung aspek yang sama. Dua aspek yang dimaksud disebut “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”.

Aspek kelembagaan terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan "jiwa" suatu kelembagaan yaitu persoalan nilai, norma, etika, dan berbagai aturan tertulis. Aspek kajian lebih jauh adalah tentang sistem kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain (Syahyuti, 2005).

Sementara, aspek keorganisasian berupa sesuatu yang lebih statis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain. Fokus utama yang dipelajari adalah struktur, peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur riil, struktur kewenangan kekuasaan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, profil, pola kekuasaan (sentralistis atau distributif), dan lain-lain.

Jadi, "kelembagaan" menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Secara sederhana, kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan suatu masyarakat. Ia ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Setiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Meskipun batasan kelembagaan dan organisasi berbeda-beda menurut berbagai ahli, namun apa yang dimaksud adalah merupakan suatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.

Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di pedesaan di perlukan serangkaian intervensi sosial ekonomi yang mendorong perubahan-perubahan dari kondisi pertanian tradisional menjadi kondisi industri melalui proses industrialisasi. Selama ini telah dikenal adanya kelembagaan ekonomi di pedesaan yang menghidupi kegiatan perekonomian pedesaan yang tradisional seperti lumbung desa, pasar mingguan, pasar ternak, koperasi dan sebagainya. Eksistensi dan manfaatnya telah cukup dirasakan oleh masyarakat pedesaan, hanya saja pertumbuhan dan perkembangannya relative lambat.

Pembangunan ekonomi pedesaan memerlukan penguatan kelembagaan ekonomi, seperti kelembagaan pendanaan yang membantu menyediakan dana sebagai modal usaha, kelembagaan pasar, sarana pendukung dan sarana penunjang, kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Inilah yang dimaksud dengan ekonomi kelembagaan dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Ekonomi kelembagaan sudah lama dikenal berperan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berbeda dengan penduduk pedesaan, penduduk perkotaan pada umumnya relative

menguasai IPTEK. Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi pedesaan, ekonomi kelembagaan dipandang lebih sesuai karena masih memiliki semangat gotong royong dan bekerjasama dibandingkandengan kegiatan ekonomi yang bersifat individualistis. Para ahli berpendapat bahwa lembaga dapat diartikan sebagai norma/kaidah, peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling kerjasama. Dalam program penanggulangan kemiskinan selalu mengacu kepada upaya memperkuat kemampuan kelompok yang terdiri atas keluarga-keluarga

Sesuai dengan pengertian lembaga di atas, yang dimaksudkan dengan ekonomi kelembagaan di sini adalah kelompok yang terdiri dari keluarga-keluarga yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonominya. Jelas, bila ekonomi keluarga dan ekonomi kelembagaan dikuatkan maka orang miskin akan semakin sedikit (Cornelis, 2005).

Koperasi

Jatidiri koperasi adalah “kepribadian” yang merupakan ciri, sifat dan watak koperasi yang membedakannya dengan lembaga ekonomi lain. Dengan lain perkataan, kalau koperasi dalam pemikiran, sikap, dan tindakannya tidak sesuai dengan perumusan jati diri tersebut maka dapat dikatakan bahwa koperasi yang bersangkutan telah menyimpang atau kehilangan jati dirinya. Sesuai dengan ICIS, jatidiri koperasi meliputi tiga bagian, yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Tiga bagian tersebut yaitu: definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip (Soedjono, 2002).

Definisi koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut: swadaya, swa-tanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan, dan kesetiakawanan.

Dalam tradisi dari pendiri-pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etnik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang-orang lain.

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Banyak orang mengartikan prinsip-prinsip sebagai perintah besi yang harus dipatuhi menurut bunyinya. Oleh karena itu adalah benar bahwa prinsip-prinsip seharusnya merupakan standar bagi pengukuran kinerja koperasi. Prinsip-prinsip yang merupakan jantung dari koperasi adalah tidak independen antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing prinsip saling terkait, bilamana yang satu diabaikan, keseluruhan

menjadi kurang. Koperasi seharusnya tidak dapat dinilai secara eksklusif berdasarkan salah satu diantara prinsip-prinsip, akan tetapi harus dinilai seberapa jauh koperasi secara benar mentaati prinsip-prinsip tersebut secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip koperasi meliputi:

- (1) Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- (2) Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;
- (3) Partisipasi ekonomi anggota;
- (4) Otonomi dan kebebasan;
- (5) Pendidikan, pelatihan dan informasi;
- (6) Kerjasama diantara koperasi-koperasi; dan
- (7) Kepedulian terhadap komunitas. Tiga prinsip pertama secara esensial dikaitkan pada dinamika internal, tipikal bagi setiap koperasi. Empat prinsip yang terakhir menyangkut operasi internal maupun hubungan eksternal oleh koperasi.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar penelitian ini meliputi tiga kegiatan, yaitu:

- (1) Identifikasi kondisi kelembagaan lokal koperasi nelayan;
- (2) Analisis kondisi eksisting yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan; dan
- (3) Menyusun pola/bentuk penguatan kelembagaan koperasi nelayan.

Tahapan Penelitian

Identifikasi Kondisi Kelembagaan Lokal Koperasi Nelayan

Pada tahap ini penelitian dilakukan dengan cara survey tentang:

a. Kondisi koperasi nelayan di Kabupaten Bangkalan

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder tentang koperasi nelayan di Kabupaten Bangkalan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan: (1) LSM yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan; (2) peneliti sebelumnya yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan; dan (3) staf Kantor koperasi dan Dinas kelautan di Kabupaten Bangkalan. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari : (1) LSM yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan; (2) peneliti sebelumnya yang terkait dengan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Bangkalan; (3) Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan; (4) Kantor koperasi Kabupaten Bangkalan; dan (5) Dinas kelautan Kabupaten Bangkalan. Data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai gambaran umum kondisi perikanan dan koperasi nelayan di Kabupaten Bangkalan. Gambaran umum tersebut merupakan dasar

untuk memilih satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang menjadi lokasi penelitian.

b. Kondisi koperasi nelayan di Kecamatan Lokasi Penelitian

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder tentang koperasi nelayan di Kecamatan Tanjungbumi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan: (1) staf Kantor koperasi Kabupaten Bangkalan; (2) staf Dinas kelautan Kabupaten Bangkalan; (3) staf Kecamatan Tanjungbumi; dan (4) stakeholder nelayan dan koperasi nelayan di Kecamatan Tanjungbumi. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari: (2) Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan; (1) Kantor koperasi Kabupaten Bangkalan; (2) Dinas kelautan Kabupaten Bangkalan; (3) stakeholder Kecamatan lokasi penelitian; dan (4) stakeholder nelayan dan koperasi nelayan di Kecamatan lokasi penelitian. Data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai gambaran umum kondisi perikanan dan koperasi nelayan di kecamatan lokasi penelitian. Gambaran umum tersebut merupakan dasar untuk memilih satu desa di Kecamatan lokasi penelitian. Desa tersebut kemudian ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan satu desa tersebut dalam rangka memudahkan fokus penguatan kelembagaan satu koperasi nelayan yang telah ada. Koperasi nelayan yang telah terpilih merupakan koperasi yang dianggap paling potensial untuk sarana implementasi model yang telah disusun.

c. Kondisi koperasi nelayan di Desa Lokasi Penelitian

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder tentang koperasi nelayan. Data primer diperoleh melalui survey terhadap stakeholder nelayan dan koperasi nelayan serta masyarakat nelayan di lokasi penelitian. Survey terhadap nelayan di Desa lokasi penelitian dilakukan dengan cara wawancara menggunakan instrumen berupa kuisioner. Dasar penyusunan kuisioner adalah konsep tentang jatidiri koperasi. Jumlah responden nelayan sebanyak 10 orang/dusun dikalikan dengan jumlah tipe responden. Jumlah tipe responden, yaitu: (1) nelayan juragan; (2) nelayan pekerja; dan (3) bakul ikan. Pada umumnya setiap nelayan mempunyai anggota keluarga/istri yang bekeja sebagai penjual ikan hasil tangkapannya. Oleh karena itu, pemilihan responden bakul ikan adalah orang yang suaminya atau anggota keluarganya (nelayan) belum terpilih sebagai responden. Hal tersebut untuk menghindari jawaban yang sama. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari stakeholder nelayan dan

koperasi nelayan di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi.

Menganalisis Kondisi *Excisting* Mengenai Kelembagaan Koperasi Nelayan pada Obyek Penelitian

Pada tahap ini semua data dan informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya dientry dan dianalisis untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai persepsi masyarakat tentang kelembagaan koperasi nelayan di lokasi penelitian.

Memberi Masukan Pola/Bentuk Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan

Pada tahap ini, setelah diketahui kondisi yang sebenarnya mengenai persepsi masyarakat tentang kelembagaan koperasi nelayan, selanjutnya membuat sebuah masukan alternatif pola penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang mungkin bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan di lokasi penelitian pada khususnya dan pengembangan kebijakan pada tingkat pemerintahan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Kelembagaan Lokal Koperasi Nelayan Hasil Observasi dan Telaah Kaji Pustaka

Hasil identifikasi permasalahan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangkalan, antara lain:

1. Keterbatasan Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Sumberdaya laut Bangkalan secara potensial bisa dikatakan luas. Tetapi pada saat ini telah mengalami fenomena *over fishing* (tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para nelayan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh makin bertambahnya jumlah/kepadatan nelayan namun tidak diimbangi oleh pencarian fishing ground baru yang lebih luas. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) nelayan Kabupaten Bangkalan hanya terbatas di sekitar Laut Jawa dan Selat Madura.

2. Sumber Daya Manusia (Nelayan) Masih Rendah

Ketrampilan nelayan diperoleh secara turun-temurun. Nelayan cenderung bersikap apatis dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan ketrampilannya. Hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan produksi yang signifikan. Nelayan tradisional di Kabupaten Bangkalan belum bisa melihat adanya insentif (keuntungan) dari peningkatan ketrampilan.

3. Teknologi Penangkapan yang Masih Sederhana

Teknologi penangkapan ikan yang dipakai oleh nelayan Kabupaten Bangkalan sebagian besar masih bersifat tradisional. Hal

ini dapat dilihat dari jenis perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Perahu yang dipakai oleh nelayan Bangkalan untuk melaut umumnya berskala kecil dengan tonase tidak lebih dari 5-10 GT (bobot mati). Sedangkan alat tangkapnya terdiri dari pancing dan jaring insang. Kondisi ini membuat para nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan di laut lepas bahkan sampai zone ZEE. Kecuali untuk nelayan Tanjung Bumi yang telah memiliki perlengkapan kapal yang cukup memadai.

4. Teknologi Pengolahan Ikan (Pasca Panen) yang Tradisional

Industri pengolahan ikan di Kabupaten Bangkalan masih terbatas produksinya untuk produk-produk sederhana saja seperti: ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. Belum adanya investasi dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti industri pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan sederhananya saja. Hal ini jelas berdampak pada penghasilan nelayan, karena produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki nilai ekonomis yang rendah.

5. Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Permodalan yang Lemah

Masalah klasik yang membuat kelompok nelayan sulit untuk mengembangkan usahanya salah satunya adalah masalah permodalan yang tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas nelayan untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan tidak berfungsinya Koperasi Nelayan untuk menjadi organisasi ekonomi nelayan.

Hasil Diskusi (*Deep of Interviews*) ke Institusi Terkait

Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membantu masyarakat pesisir diantaranya adalah dengan membuat beberapa program pembinaan dan pelatihan bagi nelayan atau keluarganya, bantuan sarana-prasarana alat tangkap, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pembinaan dan pelatihan untuk nelayan diantaranya adalah menerapkan teknik-teknik penangkapan ikan yang baik, sementara bagi keluarga nelayan diantaranya adalah teknik pengolahan ikan hasil tangkapan (pasca panen). Sarana dan prasarana alat tangkap yang merupakan bantuan dinas antara lain berupa jaring atau alat pendeteksi keberadaan ikan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan bentuk kepedulian Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditujukan untuk mendekatkan masyarakat pesisir pada dunia perbankan, sehingga diharapkan

penyaluran Dana Ekonomi Produktif (DEP) mampu meningkatkan akses permodalan masyarakat pesisir. Sasaran PEMP bukan saja nelayan, tetapi juga masyarakat pesisir lain seperti pedagang, bakul ikan, warung, dan lainnya yang berada di pesisir pantai. Program PEMP adalah program nasional dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang dimulai sejak tahun 2001 di Indonesia dan baru dimulai sejak tahun 2005 di Kabupaten Bangkalan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan menetapkan Koperasi Penerima DEP berdasarkan hasil kerja tim seleksi Koperasi yang keberadaannya telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan. Koperasi Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) harus melaksanakan kerjasama dengan Bank Pelaksana (BRI) untuk membentuk Swamitra Mina dengan persyaratan pendirian sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Koperasi
2. Memiliki unit simpan pinjam
3. Tersedianya aliran listrik yang memadai
4. Tersedianya saluran telepon dari telkom
5. Tersedianya gedung / ruang kerja
6. Memiliki laporan keuangan yang terpisah dari unit lain (otonom)
7. Tidak sedang menanggung kerugian yang materiil
8. Tidak sedang terjadi perselisihan (perdata / pidana / kepailitan)

Kondisi Kelembagaan Koperasi Nelayan

Jumlah koperasi di Kabupaten Bangkalan tahun 2006 sebanyak 465 koperasi primer dan 3 koperasi sekunder. Koperasi primer terdiri dari 27 jenis, yang salah satunya adalah koperasi nelayan. Jumlah koperasi nelayan sebanyak 21 koperasi, tetapi hanya 4 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah anggota koperasi nelayan sebanyak 592 orang, meliputi: 500 orang laki-laki (84%) dan 92 orang perempuan (16%). Komposisi modal meliputi: modal luar 84% dan modal sendiri 16%. Kondisi tersebut menunjukkan minimnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi nelayan tentang peroperasian dan besarnya ketergantungan koperasi nelayan terhadap pihak luar. Di Kecamatan Tanjungbumi terdapat 24 koperasi primer yang berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, terdapat 7 koperasi nelayan yang semuanya sudah tidak aktif. Koperasi nelayan Ikan Paus yang berada di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi pada tahun anggaran 2005 merupakan salah satu koperasi penerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) PEMP Kabupaten Bangkalan dalam bentuk SPDN. Hingga saat ini SPDN tersebut belum berfungsi sebagaimana yang direncanakan, bahkan saat ini koperasi Ikan Paus juga sedang tidak aktif. Selain bantuan berupa SPDN, para nelayan

sebenarnya juga sangat mengharapkan bantuan berupa pinjaman lunak dari LEPP M3. Beberapa kali para anggota Koperasi Ikan Paus melakukan rapat dan menyusun proposal peminjaman dana ke LEPP M3 di Jl. HOS Cokroaminoto Bangkalan. Hingga hingga saat ini pengajuan proposal peminjaman tersebut belum pernah terealisasi. Mengenai tidak terealisasinya pengajuan proposal peminjaman dana oleh Koperasi Ikan Paus ke LEPP M3, terdapat kesalahpahaman antara pengurus Koperasi Ikan Paus dan pengelola LEPP M3. Menurut pengelola LEPP M3, tidak terealisasinya pengajuan proposal peminjaman dana oleh Koperasi Ikan Paus disebabkan karena pengajuan tersebut belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan peminjaman. Tetapi menurut pengurus Koperasi Ikan Paus tidak terealisasinya proposal peminjaman dana ke LEPP M3 disebabkan karena adanya diskriminasi peminjaman. Dengan belum aktifnya SPDN dan tidak terealisasinya proposal peminjaman dana ke LEPP M3, kemudian dijadikan alasan oleh Koperasi Ikan Paus untuk tidak aktif atau tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi nelayan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelembagaan koperasi nelayan selama ini sangat lemah dan hanya tergantung pada bantuan pemerintah. Pemahaman instansi terkait, pengurus dan anggota koperasi nelayan tentang jati diri koperasi juga sangat lemah.

Menganalisis Kondisi *Excisting* Mengenai Kelembagaan Koperasi Nelayan pada Obyek Penelitian

Hasil survey yang dilakukan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel tabulasi deskriptif sebagai berikut:

No.	Item-item	Jumlah (%)	Keterangan
1.	Tingkat Pendidikan a. Tidak Sekolah formal b. SD c. SMP d. SLTA	30% 62,5% 6,7% 0,8%	Tingkat pendidikan nelayan masih sangat rendah, hampir 95% pendidikan masih dibawah program pemerintah "wajib belajar 15 tahun" (minimal SMP)
2.	Pekerjaan Tambahan (sampingan) a. tidak punya kerja tambahan b. punya pekerjaan tambahan	88,2% 10,8%	Nelayan relatif tidak mempunyai pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya
3.	Pengertian tentang koperasi a. mengetahui b. tidak mengetahui	27,5% 72,5%	Hampir sebagian besar responden belum mengerti apa itu koperasi
4.	Keanggotaan di koperasi a. tidak jadi anggota b. jadi anggota	96,7% 3,3%	Hampir sebagian besar responden belum menjadi anggota koperasi

5.	Kesediaan menjadi anggota koperasi a. bersedia b. tidak bersedia c. tidak tahu / ragu-ragu	67,5% 16,7% 15,8%	Responden relatif ada keinginan menjadi anggota koperasi
6.	Komitmen responden jika menjadi anggota koperasi: a. bersedia membayar simpanan pokok b. bersedia menjadi pelanggan koperasi c. bersedia menabung d. bersedia menghadiri rapat e. bersedia aktif di koperasi	87,7% 74,1% 80,2% 91,4% 66,7%	Ada keinginan yang cukup besar dari responden untuk menjadi anggota koperasi dan mengikuti kegiatan koperasi. Hal ini ditandai oleh persentase yang dominan dari responden untuk berinteraksi dalam aktivitas koperasi

Beberapa hal yang bisa dijelaskan atas hasil tabulasi responden dan dikaitkan dengan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan beberapa responden yang merepresentasikan masyarakat nelayan di atas, antara lain:

- a. **Identitas responden**, rendahnya kesadaran nelayan/responden terhadap pentingnya pendidikan sehingga berdampak pada pola pikir dan kebiasaan nelayan dalam menjalankan model usahanya.
- b. **Aktifitas responden**, sebagian besar nelayan/responden di lokasi penelitian sangat tergantung pada pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak mempunyai alternatif pekerjaan lainnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan terutama pada saat tidak musim ikan (musim paceklik). Pada saat tersebut para nelayan hanya mendapat hasil tangkapan sangat sedikit bahkan tidak jarang tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Pada saat paceklik para nelayan sangat memerlukan pinjaman dana untuk biaya melaut dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang selama ini menjadi penyebab utama terjeratnya para nelayan pada para rentenir yang kemudian berlanjut menjadi awal kemiskinan para nelayan secara berkelanjutan.
- c. **Pengetahuan responden tentang koperasi**, Berbagai data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah untuk masyarakat nelayan selama ini belum menyentuh pada upaya penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Sehingga koperasi yang menjadi sasaran program dibiarkan tetap tergantung dengan bantuan pemerintah tanpa adanya upaya pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang benar terhadap para pengurus dan anggota koperasi.

Akibatnya masyarakat nelayan tetap awam dengan organisasi koperasi dan hanya menjadi anggota pasif yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Sementara itu para pengurus koperasi juga tidak memahami tugasnya dengan baik.

Memberi Masukan Pola Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan

1. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Faktor eksternal terkait dengan persaingan saha ang semakin ketat dan kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan. Faktor internal yang paling dominan adalah karakter negatif sebagian besar nelayan, antara lain : (1) Kesadaran terhadap pendidikan dan kesehatan rendah; (2) Sifat konsumtif rumah tangga nelayan; (3) Sifat suka menunda pembayaran pinjaman; dan (4) Manajemen keuangan rumah tangga nelayan tidak teratur. Semua hal tersebut berujung pada rendahnya kredibilitas nelayan untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar nelayan di sangat tergantung pada pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak mempunyai alternatif pekerjaan lainnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan terutama pada saat tidak musim ikan (musim paceklik). Pada saat tersebut para nelayan hanya mendapat hasil tangkapan sangat sedikit bahkan tidak jarang tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Pada saat paceklik para nelayan sangat memerlukan pinjaman dana untuk biaya menangkap ikan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang selama ini menjadi penyebab utama terjeratnya para nelayan pada para rentenir yang kemudian berlanjut menjadi awal kemiskinan para nelayan secara berkelanjutan. Ikatan perjanjian antara nelayan dan rentenir pada umumnya merugikan nelayan dan berakibat pada lemahnya posisi tawar nelayan di pasar input dan output. Sementara itu manajemen keuangan rumah tangga nelayan sangat kurang terkontrol dan cenderung konsumtif. Sehingga pada saat musim ikan, pendapatannya tidak digunakan untuk membayar hutang atau berinvestasi melainkan untuk berfoya-foya. Dalam kondisi ini sebenarnya sangat dibutuhkan peran koperasi sebagai sarana bagi orang-orang yang berkepentingan sama untuk berjuang secara bersama-sama. Namun yang terjadi justru koperasi tidak berfungsi sama sekali justru semakin mengajarkan anggotanya untuk tergantung pada bantuan pemerintah (Gambar 1)

2. Pola/Bentuk Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan

Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu nelayan sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki. Tetapi secara kolektif melalui manajemen koperasi yang profesional, kekuatan pasar nelayan di pasar input dan output akan meningkat. Dengan demikian kesejahteraan nelayan juga meningkat. (Gambar 2).

Terkait pola pemberdayaan ekonomi nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi, terdapat kesamaan karakteristik antara organisasi usaha modern dengan koperasi (Bayu Krisnamurthi, 2007). Persamaan karakteristik tersebut ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Persamaan Karakteristik/Ciri Organisasi Modern dan Koperasi	
Ciri Organisasi Usaha Modern	Ciri Koperasi
• Berorientasi pada stake holder bukan hanya share holder, dimana customer menjadi pemilik utama	• Anggota sebagai pemilik dan pelanggan
• Membangun loyalitas customer melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan	• Bekerja berdasarkan partisipasi anggota dengan prinsip : Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota
• Accountable dan transparan	• Direncanakan, dikelola, dan dikontrol oleh anggota secara demokratis
• Menjunjung tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan	• Menjunjung tanggungjawab sosial dan peduli lingkungan
• Duta tawar dan daya kerjasama sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang	• Duta tawar dan daya kerjasama sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang

Sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi nelayan, maka tugas pokok koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Indikator tingkat kesejahteraan di dalam batasan ekonomi biasanya diterjemahkan ke dalam variabel pendapatan, biaya, dan laba. Dengan demikian, tugas pokok koperasi untuk mempromosikan anggota atau meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dipertegas menjadi tugas untuk meningkatkan pendapatan usaha anggota, menekan biaya usaha, dan meningkatkan laba usaha.

Beberapa manfaat apabila sekelompok nelayan melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain:

1. Membangun *economies of scale* dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input.
2. Memperoleh *external economies* yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka.

3. Memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok.

Dengan demikian tugas pokok koperasi nelayan adalah meningkatkan pendapatan nelayan yang menjadi anggotanya atau merupakan alat dari anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya. Dengan demikian peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggota menjadi kriteria evaluasi terhadap kinerja koperasi.

Berdasarkan kepada tujuan-tujuan aliansi sebagaimana diuraikan itu, maka dapatlah diidentifikasi motivasi yang melandasi lahirnya aliansi strategis, yang antara lain berbentuk koperasi, antara lain:

1. Membangun skala operasi.

Aliansi merupakan wadah ke arah pencapaian skala produksi global dan mendekati diri terhadap pelanggan di manapun berada. Tujuan akhirnya bermuara kepada pencapaian *economies of scale* dan atau *economies of scope*.

2. Membangun kemampuan inovasi secara berkesinambungan.

Peserta aliansi membawa kompetensinya masing-masing yang bersifat komplementer terhadap yang lain. Penyatuan kompetensi itu diharapkan menghasilkan tindakan inovatif yang bukan saja di dalam kerangka mempertahankan pasar yang sudah ada melainkan juga untuk membuka pasar baru, tanpa khawatir akan terjadi risiko yang harus ditanggung sendiri.

3. Maju lebih cepat dari pesaing.

Hal ini dapat diraih melalui riset dan pengembangan yang dilakukan oleh organisasi aliansi (dalam hal ini koperasi); Hasilnya digunakan secara tepat dan cepat dibawah payung aliansi, misalnya melakukan penetrasi pasar bagi produk baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dinyatakan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi permasalahan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangkalan, antara lain: (a). Keterbatasan pemanfaatan sumberdaya laut, (b). Sumber daya manusia (nelayan) masih rendah, (c). Teknologi penangkapan yang masih sederhana, (d). Teknologi pengolahan ikan (pasca panen) yang tradisional, (e). Kelembagaan ekonomi nelayan dan permodalan yang lemah.
2. Hasil diskusi (*deep of interviews*) ke institusi terkait, peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membantu masyarakat pesisir diantaranya adalah dengan membuat beberapa program pembinaan dan pelatihan bagi nelayan atau keluarganya, bantuan sarana-

- prasarana alat tangkap, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Dimana Koperasi Calon Penerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) harus melaksanakan kerjasama dengan Bank Pelaksana (BRI) untuk membentuk Swamitra Mina.
3. Jumlah koperasi di Kabupaten Bangkalan tahun 2006 sebanyak 465 koperasi primer dan 3 koperasi sekunder. Koperasi primer terdiri dari 27 jenis, yang salah satunya adalah koperasi nelayan. Jumlah koperasi nelayan sebanyak 21 koperasi, tetapi hanya 4 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah anggota koperasi nelayan sebanyak 592 orang, meliputi: 500 orang laki-laki (84%) dan 92 orang perempuan (16%). Komposisi modal meliputi: modal luar 84% dan modal sendiri 16%. Kondisi tersebut menunjukkan minimnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi nelayan tentang peroperasian dan besarnya ketergantungan koperasi nelayan terhadap pihak luar.
 4. Kondisi *Excisting* mengenai kelembagaan koperasi nelayan pada obyek penelitian, rendahnya kesadaran nelayan/responden terhadap pentingnya pendidikan sehingga berdampak pada pola pikir dan kebiasaan nelayan dalam menjalankan model usahanya, sebagai besar nelayan/responden tidak mempunyai alternatif pekerjaan selain nelayan, dan Pengetahuan responden tentang koperasi masih rendah, masih diperlukan perlakuan pemberdayaan yang berkelanjutan baik yang difasilitasi oleh masyarakat nelayan itu sendiri atas kesadaran sendiri maupun difasilitasi oleh pemerintah.
 5. Beberapa manfaat apabila sekelompok nelayan melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain: (a). Membangun *economies of scale* dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input. (b). Memperoleh *external economies* yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka. (c). Memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok.
 6. Berdasarkan kepada tujuan aliansi strategis, yang antara lain berbentuk koperasi, maka dapatlah melakukan antara lain: (a). Membangun skala operasi, (b). Membangun kemampuan inovasi secara berkesinambungan dan (c). Maju lebih cepat dari pesaing.

Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan sebaiknya diawali dengan mengorganisir nelayan yang mempunyai kepentingan ekonomi dan

- komitmen yang sama untuk bergabung dalam organisasi koperasi.
2. Skala kegiatan ekonomis tercapai melalui koperasi karena koperasi merupakan kerjasama kegiatan ekonomi yang sama dari seluruh anggota yang tergabung di dalamnya. Karena itu pembentukan suatu koperasi merupakan keputusan untuk membangun suatu aliansi strategis atau *intercompany cooperation* di antara nelayan guna mencapai keunggulan kompetitif.
 3. Pengurus dan anggota koperasi sebaiknya diberi bekal pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

-, 2005. *Bangkalan Dalam Angka 2005/2006*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan
-, 2007. *Bangkalan Dalam Angka 2007*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan
-, 2005. *Pengembangan Pembiayaan Non Bank : Koperasi simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro Bagi Nelayan di Jawa timur*. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.
-, 2000. *Kebijakan Pemberdayaan Kelembagaan Tani*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Departemen Pertanian
-, 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan*. Pusat Penyuluhan Pertanian, Departemen Pertanian
-, 2000b. *Panduan Kegiatan Perencanaan Partisipatif pada Tingkat Lapangan (TM9)*, DitjenNak, DELIVERI
-, 2000c. *Panduan Pemberdayaan Masyarakat bagi Pengambil Kebijakan (PG3)*, DitjenNak, DELIVERI
- Bayu Krisnamurthi, 2007. *Koperasi Indonesia: Tidak Akan Ada Tanpa Semangat Kerjasama*. Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen dan Peneliti Perkoperasian Indonesia (ADOPKOP), berjudul : Perkoperasian Indonesia yang Berjatidiri : Refleksi Pemikiran Koperasi masa Depan, Malang.
- Buchari Alma, 2005. *Manajemen Kredit Mikro*. Alfabeta
- Bandung.Cornelis, et al, 2005. *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*. BPFE, Yogyakarta.

- Djabaruddin Djohan, 2007. *Jaringan Koperasi dalam Persaingan Global: Penguatan Jaringan Primer dan Sekunder*. Makalah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen dan Peneliti Perkoperasian Indonesia (ADOPKOP), berjudul : Perkoperasian Indonesia yang Berjatidiri : Refleksi Pemikiran Koperasi masa Depan, Malang.
- Koutsoyiannis, 1975. *Modern Microeconomics*. The Macmillan Press.Ltd, London.
- Moeljarto, 2004. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ndraha, T. 1982. *Metodologi pembangunan Desa*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Rokhmin Dahuri, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- Rahardjo Dawam, 2002. *Apa Kabar Koperasi Indonesia*. Kompas
- Ramudi Ariffin, 2002. *Manfaat Harga Koperasi*. Landasan Teoritis Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Penerbit: Laboratorium Manajemen Koperasi IKOPIN, Bandung.
- Syahyuti, 2005. *Peran Kelembagaan dalam Upaya Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Poso Pasca Konflik*” diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna, LIPI. Subang.
- Soedjono Ibnoe, 2003. *Hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah, ditinjau dari Pandangan Internasional*. Penerbit: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta.
- Soedjono Ibnoe, 2002. *Jati Diri Koperasi*, ICA (International Co-operative Alliance) Co-operative Identity Statement, Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad Ke- 21. Penerbit: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta.
- Soedjono Ibnoe, 2002. *Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-nilai dalam Koperasi*. Penerbit: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta.
- Soedjono Ibnoe, 2003. *Instrumen-Instrumen Pengembangan Koperasi*. LSP2I, ISBN: 979-95918-5-6, Jakarta.